

Community Information Services Central Berbasis Masyarakat Sebagai Solusi Atas Overlapping Data Penerima Bantuan PKH Dan BLT

¹Hanifah Fatwa Nadilla, ²Thesalonika, ³Ariq Akmal Suwandi, ⁴Rajih Faiz Rabbani,
⁵Aulia Rahmawati

¹²³⁴⁵ Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
 hanifah19002@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK

Negara memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pemberian bantuan sosial merupakan salah satu bentuk pemberian pelayanan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab. Bantuan sosial pun juga contoh bantuan sosial yang diberikan pemerintah adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Namun dalam prakteknya, pemberian bantuan sosial banyak terjadinya polemik seperti belum meratanya pembagian bantuan sosial, tidak tepat sasaran dalam distribusi bantuan sosial, adanya subjektivitas dalam penentuan penerima bantuan, dan masyarakat yang berhak tidak mendapatkan bantuan. Permasalahan itu terjadi karena proses pengambilan data yang tumpang tindih antar institusi pemerintahan yang membuat data menjadi tidak valid dan juga tidak ada pembaharuan data pada jangka waktu tertentu. Metode yang digunakan dalam tulisan ini untuk membuat gagasan adalah studi literatur dengan membaca buku, artikel, ilmiah, dan kabar berita. Permasalahan itu terjadi karena proses pengambilan data yang tumpang tindih antar institusi pemerintahan yang membuat data menjadi tidak valid dan juga tidak ada pembaharuan data pada jangka waktu tertentu. metode yang digunakan dalam tulisan ini untuk membuat gagasan adalah studi literatur dengan membaca buku, artikel, ilmiah, dan kabar berita. Melalui tulisan ini kami berupaya untuk membuat skema dalam pengumpulan data, verifikasi data, dan pendistribusian bantuan sosial agar permasalahan-permasalahan yang ada bantuan sosial bisa dihindari. Skema dibuat berdasarkan permasalahan yang ada sebagai alternatif solusi. Skema yang dibuat bernama *communication information service central* berbasis masyarakat dimana masyarakat berkontribusi besar dalam pengelolaan pelayanan sosial.

Kata kunci: Bantuan Sosial, Data, Kesejahteraan Sosial, Masyarakat

ABSTRACT

The state has roles in improving the welfare of its people. The provision of social assistance is a form of service that provided by the government to improve the welfare of its people, reduce poverty, and as a form of concern and responsibility. there are many social assistance that provided by Indonesia Government, namely the Direct Cash Assistance (Bantuan Langsung Tunai) and the Family Hope Program (Program Keluarga Harapan). However, in the field, there are many polemics in the provision of social assistance, such as the unequal distribution of social assistance, inappropriate distribution of social assistance, subjectivity in determining beneficiaries, and people who are not entitled to receive assistance. These problems occurs because the data collection process overlaps between government institutions which makes the data invalid. also there is also no data update for a certain period of time. methode we use in this paper to ideate thescheme is literature study by read book, journal article, and news. through this paper we seek to create a scheme in data collection, data verification, and distribution of social assistance so that problems with social assistance can be avoided. Schemes are made based on existing problems as alternative solutions. The scheme we named it as community based community information services central where community participation has large contribution.

Keywords: Assistance Social, Data, Social Welfare, Community.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD Republik Indonesia tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Maksud dari kesejahteraan umum disini adalah bagaimana peran negara dalam membantu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pemberian pelayanan yang komprehensif seperti adanya bantuan sosial merupakan salah satu peran penting negara untuk menunjang kesejahteraan rakyatnya. Berbicara mengenai program bantuan sosial, merupakan salah satu komponen program jaminan sosial yang menjadi bentuk realisasi tanggung jawab pemerintah pusat atau daerah yang peduli dengan kondisi masyarakat miskin terlantar (Rahmansyah, dkk., 2020). Beberapa program yang diberikan oleh negara seperti bantuan langsung tunai (BLT), dan program keluarga harapan (PKH) telah diselenggarakan oleh negara Indonesia sebagai program untuk membantu masalah sosial khususnya kemiskinan. Diadakannya program bantuan langsung tunai pada tahun 2005 sebagai akibat dari kenaikan harga minyak di tahun 2004 (Iping, 2020). Kemudian, pada tahun 2008 program bantuan langsung tunai dilaksanakan kembali sebagai salah satu upaya dalam pengentasan kemiskinan. Sedangkan program keluarga harapan merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM). Dilansir dari situsnya, PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan dengan mensinergikan berbagai program pemberdayaan sosial nasional (Kemensos, 2019).

Hingga saat ini, meskipun adanya bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga kategori miskin (tidak mampu) telah diselenggarakan dalam jangka waktu yang cukup lama masih terdapat warga negara yang belum terpenuhi atas hak kebutuhan dasarnya secara layak dari negara. Permasalahan seperti keterbatasan dana yang akan disalurkan, kemiripan data keadaan ekonomi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan adanya subjektivitas pengambilan keputusan menyebabkan bantuan yang tidak tepat sasaran

(Putri, dkk., 2021). Dilansir dari sumbernya, permasalahan terkait data bantuan sosial yang menyebabkan keluarga penerima manfaat tidak menerima bantuan sosial karena data tidak terintegrasi dengan NIK serta lemahnya proses validasi dan verifikasi data yang dilakukan oleh negara (British Broadcasting Corporation, 2021). Polemik lain yang menyebabkan permasalahan mengenai bantuan sosial adalah banyaknya masyarakat yang tidak layak mendapatkan bantuan sosial justru mendapat bantuan sosial (Teja, 2020). Hal tersebutlah yang membuat kecemburuan sosial dengan keluarga penerima manfaat yang seharusnya mendapatkan bantuan sosial.

Dalam kondisi realita, terkait bantuan sosial yang ada di Indonesia banyak sekali polemik masalah yang terjadi baik di pemerintah pusat maupun daerah, dengan melihat berita atau kritikan yang datang. Misalnya saja disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang dimana beliau bicara bahwa di setiap kementerian memiliki survei terhadap data masing-masing yang menyebabkan ketidaksinkronan data dari pusat maupun daerah menyebabkan salah satu contoh kasusnya adalah ketika adanya penolakan bantuan sosial dari pemerintah Jawa Barat kepada sejumlah kepala desa di Sukabumi. Mereka beralasan bahwa belum adanya data valid serta adanya ketumpang tindih dengan data warga yang terdaftar dari PKH (Program Keluarga Harapan) dari pemerintah Pusat (CNBC, 2020). Dilansir dari berita yang sama, disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, beliau menyampaikan terkait persoalan data yang dimana pemerintah diharuskan untuk memperbarui kualifikasi data penerima bansos, kemudian jangan mempergunakan data dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dikarenakan data tersebut verifikasi terakhirnya pada tahun 2015. Kemudian dilansir dari (Tirto, 2020) melalui Gubernur Sumatera Barat Iwan Prayitno beliau memperhatikan bahwa data program bantuan sosial kacau dan rawan untuk salah sasaran. Beliau menjelaskan bahwa adanya skema bantuan yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat. Pertama BLT (Bantuan Langsung Tunai) dari kemensos. dalam BLT kemensos tercatat 250 ribu kepala keluarga yang terdaftar yang akan mendapatkan bantuan. Seiring berjalannya waktu dipangkas menjadi

234 ribu kepala keluarga kemudian dipotong lagi menjadi 206 ribu kepala keluarga. beliau juga mengeluhkan bahwa hal ini menjadi membuat report bagi Bupati dan Walikota di wilayahnya.

Kemudian menurut Egi Primayogha seorang Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) beliau menyebutkan bahwa titik rawan penyaluran BLT dana desa di bagian pendataan calon penerima BLT rawan dijadikan “mainan” sejumlah oknum yang bisa saja dimanipulasi oleh sebab itu Kepala Desa, Camat, sampai Bupati/Walikota harus serius dalam verifikasi data penerima, jangan sampai mereka yang menjadi pihak penyelewengan BLT lewat manipulasi data (Lokadata, 2020). Menteri Keuangan, Sri Mulyani juga mengakui bahwa jika data menjadi sumber masalah dari kacaunya proses penyaluran bansos bagi masyarakat yang terdampak pandemi korona. beliau juga mengatakan “setelah ditelisik, data penerima bantuan sosial ini belum di update sejak 2015” ia menambahkan juga terkait proses pembaharuan data memang tergantung pada Pemerintah daerah (Pemda) masing-masing akan tetapi dari pihak pemda tidak rutin melakukan pembaharuan data, karena itulah menjadi permasalahan ketidaksesuaian data padahal sangat penting sekali bagi penyaluran saat pandemi korona di tahun 2020 (Lokadata, 2020).

I. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, tim penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana CISC menjadi solusi atas masalah tumpang-tindih data penerima bantuan sosial?
2. Bagaimana CISC menjadi solusi atas masalah salah sasaran penerima bantuan sosial?

II. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh tim penulis atas gagasan ini, ialah:

1. Mengatasi masalah tumpang tindih data penerima bantuan sosial PKH dan BLT.
2. Menjadi solusi atas data program bantuan sosial, terutama PKH dan BLT, yang kacau dan rawan untuk salah sasaran.

III. Manfaat

1. Memberi masukan mengenai alternatif solusi untuk permasalahan data program bantuan sosial
2. Bagi masyarakat yang membaca gagasan ini diharapkan bisa menambah informasi dan meningkatkan kesadaran akan permasalahan data program bantuan sosial

SOLUSI YANG DITAWARKAN

I. Kondisi Kekinian

Merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019, bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Bantuan sosial merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Terdapat berbagai jenis bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang reguler, non reguler, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pembahasan akan difokuskan pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga kurang mampu yang terdapat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki komponen sebagai persyaratan yang ditetapkan sebagai peserta PKH. Mekanisme PKH dilaksanakan mulai dari perencanaan, penetapan calon peserta PKH, penetapan KPM PKH, penyaluran bantuan sosial PKH, pendampingan PKH, peningkatan kemampuan keluarga, verifikasi komitmen KPM PKH, pemutakhiran data KPM PKH, dan transformasi kepesertaan PKH.

Pengumpulan data penerima PKH ini dianggap kurang efektif karena penentuan penetapan calon peserta PKH yang dilakukan langsung oleh pemerintah pusat tidak menyeluruh atau tidak melihat secara langsung bagaimana keadaan masyarakat yang sebenarnya (Lestari, 2019). Verifikasi dan validasi data penerima PKH dilakukan setelah penetapan calon

PKH Data mengenai lokasi dan jumlah penerima KPM bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dianggap oleh BPK masih kurang akurat bila dijadikan sebagai dasar penyaluran bansos (Bisnis.com, 2020). Hal ini dapat membuat masyarakat yang sebenarnya membutuhkan bantuan justru tidak bisa mendapatkannya karena tidak terdata di DTKS.

Permasalahan mengenai data penerima bantuan sosial tidak berhenti pada PKH saja. Bantuan Langsung Tunai atau BLT merupakan program bantuan pemerintah dengan pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin. Tujuan utama dari BLT adalah untuk membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya (Warta Ekonomi, 2020). Terdapat berbagai jenis BLT saat ini, seperti subsidi gaji, kartu pra kerja, BLT UMKM, BST, dan BLT Dana Desa. Masyarakat yang sudah menerima bantuan salah satu BLT tersebut tidak bisa mendapatkan bentuk BLT lainnya dan PKH, kecuali untuk BLT UMKM. Sayangnya, fenomena masyarakat yang mendapat bantuan sosial ganda sudah terjadi di lapangan (CNBC Indonesia, 2020).

Dalam praktiknya, penyaluran bantuan sosial dari pemerintah ini memang kerap diiringi dengan berbagai permasalahan. Menurut (Dewi, 2020), dengan beragamnya jenis bantuan sosial dan mekanisme penyaluran, maka masalah kerumitan yang sangat terlihat adalah masalah pendataan warga penerima, ketidaksinkronan data dan kekhawatiran adanya double (dua kali) penyaluran terhadap satu orang. Setelah penyaluran tahap 1 (satu) dilakukan, hingga awal Juni 2020, diketahui permasalahan mengenai kerumitan pendataan penyaluran bansos masih menjadi perbincangan publik dan dipertanyakan banyak orang. Walaupun permasalahan tersebut merupakan evaluasi saat masa pandemi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan permasalahan distribusi bantuan sosial atau bansos bagi masyarakat sebenarnya sudah lama terjadi. Namun hal ini ia sebut baru terasa ketika Pandemi Covid-19 terjadi (Tempo, 2021).

Menteri Sosial Tri Risma menjelaskan bahwa permasalahan data ini sudah ada sejak

tahun 2015 (Sindonews, 2021). Dari berbagai permasalahan, overlapping data penerima bantuan sosial menjadi salah satu masalah yang menuai cukup banyak sorotan. Overlapping data merupakan suatu kondisi dimana terdapat data yang tumpang tindih sehingga berdampak pada penyaluran dan penerima bantuan sosial. Beberapa tokoh di pemerintahan mengakui adanya overlapping data bantuan sosial ini. Menteri Keuangan, Sri Mulyani tak menampik, bahwa telah terjadi tumpang tindih atau overlapping dalam penyaluran bansos, baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa hal ini lebih baik daripada tidak dapat (CNBC Indonesia, 2020).

Berdasarkan keterangan tertulis yang dilansir dari (Tempo, 2021), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas juga mengakui data penerima bantuan pemerintah saat ini masih saja tumpang tindih dan mengakibatkan minimnya akurasi dalam menentukan sasaran penerima bantuan. Sorotan overlapping data bahkan juga datang dari Presiden RI, Joko Widodo yang menyatakan bahwa ketidakakuratan data, contohnya data yang tumpang tindih membuat penyaluran lambat dan tak tepat sasaran, begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya (Liputan 6, 2021).

Dr. Hempri Suyatna, Kepala Pusat Kajian Pembangunan Sosial (SODEC), Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial, Fisipol UGM, melalui (Agung, 2021) berpendapat bahwa persoalan yang kemudian muncul memang lebih terkait soal validasi data yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum *update*. Muncul pula masalah adanya konflik regulasi dan lemahnya sinkronisasi antara pemangku kepentingan (Kemenko, Kemendesa, Kemensos, Kemendagri, Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi/kabupaten) dan sebagainya. Juga soal adanya pemburu rente dalam penyaluran bansos atau politisasi bantuan sosial yang semua diakibatkan banyaknya pintu untuk pendataan. Permasalahannya bisa bermacam-macam, mulai dari NIK yang tidak valid atau ada yang ganda, ada juga yang sudah meninggal dan pindah masih tercantum, dan terkadang ada ketidakpadanan data dari Dukcapil Kabupaten/Kota dengan Dukcapil Kemendagri.

Berdasarkan kajian yang dilakukan TII, kata Agus Sarwono Peneliti TII, seharusnya proses verifikasi dan validasi rutin dilakukan untuk memperbarui data terpadu kesejahteraan sosial, enam bulan hingga satu tahun sekali. Perlu dibentuk tim di tingkat terendah untuk melakukan pendataan yang aktual (BBC News, 2021).

I. Solusi yang Pernah Ditawarkan

Melihat permasalahan yang ada tentunya mulai bermunculan bermacam solusi yang ada untuk mengatasi permasalahan tersebut. Seperti halnya yang dicetuskan oleh Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto yaitu dengan menghimpun dana dari para donatur yang nantinya akan disalurkan melalui program yang telah dibuat melalui Pemerintah Kota Bogor yaitu Sistem Kolaborasi dan Partisipasi Rakyat (Salur) yang nantinya memiliki sebuah web yang bisa diakses di salur.kotabogor.go.id. Salur ini termasuk kedalam program keluarga asuh, yang dimana ini tidak hanya diperuntukan untuk pengajuan bagi warga yang membutuhkan saja yang dimana mereka bisa mendaftarkan diri melalui website tersebut, tetapi juga bisa untuk warga yang ingin memberikan bantuan dalam hal berdonasi.

Tapi yang perlu dikritik adalah mengapa harus berupa sistem donasi atau *crowdfunding* yang diibaratkan sebagai tandingan dari dana bansos yang sudah ada dari pemerintah, seharusnya lebih kepada memperbaiki, atau merumuskan ulang sistem yang semrawut atau yang gagal itu, sehingga bisa memaksimalkan dan tidak dibiarkan begitu saja.

II. Gagasan yang Diajukan

Gagasan yang menjadi solusi atas masalah overlapping data dan ketidaktepatan sasaran bantuan sosial PKH dan BLT ialah pengadaan Community Information Services Central Berbasis Masyarakat di tiap desa dan atau kelurahan seluruh Indonesia. Sesuai dengan basisnya yaitu masyarakat, unit ini akan beranggotakan masyarakat yang berbeda lokasi (minimal berbeda kabupaten) untuk meminimalisasi terjadinya praktik nepotisme atau pemalsuan data yang dapat menyebabkan bantuan sosial tidak tepat sasaran.

Tugas dari Community Information Services Central Berbasis Masyarakat ialah mengambil data di lapangan setiap 6 bulan sekali. CSIC akan menerima indikator dan kategorisasi penerima bantuan PKH dan BLT dari pusat (Kemensos) dan akan mendapat pelatihan pengambilan data pada masyarakat sebelum kemudian mengambil data ke masyarakat. Setelah itu, CSIC akan mengambil data ke masyarakat sesuai indikator dan kategorisasi yang ada kemudian mengolah data tersebut demi menghindari adanya data yang *double* atau tidak tercatat. Lalu, CSIC dapat meng-*upload* data ke sistem pusat dan pusat (kemensos) dapat mencairkan bantuan sosial.

Dengan adanya ide gagasan ini, kami berharap data penerima bantuan sosial terutama PKH dan BLT tidak lagi tumpang tindih dan bantuan sosial PKH dan BLT dapat tersalurkan tepat sasaran.

III. Pihak-Pihak yang Membantu Mengimplementasikan

Melihat gagasan yang ditawarkan, maka diperlukan peran dari berbagai stakeholder yang berkaitan dalam menunjang berjalannya program Community Information Service Berbasis Masyarakat. Stakeholder merupakan pemangku kepentingan atau pihak yang memiliki kepentingan baik individu, kelompok atau komunitas yang dapat mempengaruhi suatu program dan atau kegiatan. Sesuai dengan tujuan dari adanya program ini sebagai solusi atas overlapping data bantuan sosial PKH dan BPNT, maka terdapat tiga stakeholder utama yang berpengaruh terhadap terselenggarakannya program Community Information Service Berbasis Masyarakat yaitu Dinas Sosial dari setiap Kabupaten/Kota, Badan Pusat Statistik (BPS), dan masyarakat dari setiap Kelurahan/Desa terkait.

Dinas Sosial merupakan sebuah lembaga pemerintahan dibawah Kementerian Sosial yang bergerak di bidang sosial khususnya sebagai lembaga yang mengurus terkait bantuan sosial. Dinas Sosial sebagai pihak eksternal yang sangat berpengaruh terhadap data penerima manfaat dari setiap kelurahan dan atau desa. Setiap data keluarga yang menerima manfaat khususnya PKH telah dihimpun oleh Dinas Sosial. Berkaitan dengan program yang telah digagas, Dinas Sosial

memiliki kewenangan untuk membantu masyarakat khususnya dalam penyaluran informasi sehingga informasi mengenai data bantuan sosial dapat tersampaikan dengan jelas kepada masyarakat melalui program tersebut.

Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki tanggung jawab langsung kepada Presiden (Badan Pusat Statistik, 2021). Dalam menjalankan tugasnya, BPS memiliki tugas pemerintahan di bidang statistik seperti penyusunan data, survei statistik, dan penetapan statistik. Setiap tahunnya, BPS mencatat tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia seperti pada Maret 2020, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 26,42 juta orang. Angka tersebut telah meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 9,41% atau 25,14 juta penduduk (Kemensos, 2021). Mengingat tingkat kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi, maka program pemerintah seperti PKH dan BLT dapat dijadikan sebagai pengaman sosial serta membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada praktiknya, meskipun PKH dan BLT telah disalurkan dan diberikan kepada keluarga penerima manfaat, masih terdapat banyak hal-hal yang menyebabkan data tidak tepat sasaran kepada keluarga penerima manfaat. Oleh karena itu, BPS memiliki peran penting terhadap keterlibatan program Community Information Service Berbasis Masyarakat untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya overlapping data. Implementasi keterlibatan BPS yaitu BPS dapat membantu dalam menghimpun data keluarga penerima manfaat setiap enam bulan sekali, melakukan pengecekan ulang terhadap data KPM, serta mengawasi berbagai hal yang berkaitan dengan data penerima bantuan sosial baik PKH ataupun BLT.

Berbeda dengan Dinas Sosial dan BPS yang merupakan stakeholder dari pihak luar, masyarakat juga merupakan stakeholder penting yang memiliki peran besar terhadap berjalannya program tersebut. Masyarakat sendiri yang akan menjadi bagian dari program Community Information Service serta yang menjalankan program tersebut sehingga, jika masyarakat terlibat, diharapkan dapat menjadi pihak subjektif yang akan bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS).

IV. Langkah-Langkah Strategis untuk Mengimplementasikan Gagasan

Langkah strategis perlu direncanakan dengan matang agar gagasan ini dapat direalisasikan dengan baik, yaitu dengan:

Tahap 1: Pembentukan Community Information Services Central Berbasis Masyarakat di setiap kelurahan dengan anggotanya bukan PNS.

Tahap 2: Pelatihan pengambilan data pada masyarakat bagi CISC dan pemberian indikator dan kategorisasi penerima bantuan sosial PKH dan BLT.

Tahap 3: Penempatan lokasi pengambilan data setiap kelurahan yang berlokasi di daerah yang berbeda kabupaten.

Tahap 4: Pengolahan data.

Tahap 5: Upload data ke sistem pusat.

Tahap 6: Bantuan sosial siap disalurkan dengan data dari CSIC.

KESIMPULAN

Community Information Services Central Berbasis Masyarakat merupakan sebuah gagasan yang diyakini akan menjadi solusi bagi permasalahan klasik bantuan sosial, yaitu overlapping data. Melalui keterlibatan masyarakat dalam pengambilan data di daerah yang berbeda dan para stakeholder lain yang terkait, CISC tidak hanya menjawab permasalahan data, tetapi juga sampai ke masalah distribusi bantuan sosial. Namun, terdapat beberapa peluang dan tantangan yang kemungkinan akan dihadapi dalam proses penyelenggaraannya.

Adapun peluang dari gagasan yang telah dipaparkan, yaitu:

1. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan masyarakat sehingga berpotensi mendapatkan dukungan dari masyarakat.
2. Masalah *overlapping data* penerima dan salah sasaran bantuan sosial PKH dan BLT belum menemukan solusi, maka gagasan ini dapat menjadi solusi.

Selain peluang terhadap tantangan yang akan di hadapi dalam gagasan yang telah dipaparkan:

Ketika dalam penerapannya, implementasi dari gagasan yang tersebut perlu memerlukan waktu yang cukup lama,

dikarenakan dalam perbaikan dalam pengolahan data, adaptasi dari masyarakat terkait adanya perubahan terlebih lagi jika di suatu daerah yang sulit akan konektivitas jaringan.

Prediksi Hasil

Sesuai dengan peluang yang diberikan oleh gagasan ini, masyarakat akan dilibatkan penuh dalam terselenggarakannya CISC. Untuk memperbaharui data penerima bantuan sosial PKH dan BLT komunikasi adalah hal yang utama dari setiap elemen agar data yang diterima akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat disetiap daerah. Selain itu, dengan adanya program CISC diharapkan seluruh stakeholder seperti Dinas Sosial, BPS, dan masyarakat dapat menjalankan peran dan fungsinya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung. (2021, Juli 22). Pengamat UGM: Penyaluran Bansos Jangan Tumpang Tindih. <https://ugm.ac.id/id/berita/21411-pengamat-ugm-penyalaran-bansos-jangan-tumpang-tindih>
- BBC News. (2021, Juli 27). Bansos PPKM darurat dan level 4: Data penerima 'bermasalah', cerita warga: 'Jangankan dapat bantuan, didata saja tidak pernah'. *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57746385>
- Bisnis.com. (2020, Mei 11). Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Banyak Kelemahan, Bagaimana Nasib Bansos? *Bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200511/9/1238545/data-terpadu-kesejahteraan-sosial-banyak-kelemahan-bagaimana-nasib-bansos->
- CNBC Indonesia. (2020, April 27). Data Selalu Kacau, BLT Ada yang Dapat 'Double'. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200427152451-4-154740/data-selalu-kacau-blt-ada-yang-dapat-double>
- CNBC Indonesia. (2020, Mei 08). Sri Mulyani: Data Bansos Masih Tumpang Tindih. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200508215727-4-157266/sri-mulyani-data-bansos-masih-tumpang-tindih>
- Dewi, R. S. (2020, Juni 10). Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Tahap Satu, Covid-19. *Ombudsman RI*. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--evaluasi-penyalaran-bantuan-sosial-bansos-tahap-satu-covid-19->
- Iping, B. (2020). PERLINDUNGAN SOSIAL MELALUI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI ERA PANDEMI COVID-19: TINJAUAN PERSPEKTIF EKONOMI DAN SOSIAL. *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*, 1(2), 516–526. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v1i2.290>
- Lestari, G. (2019). *Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi*. Retrieved November 20, 2021, from <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/31612/150903021.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Liputan 6. (2021, Mei 27). Jokowi Akui Ada Tumpang Tindih Data Dana Bansos yang Rugikan Masyarakat. *Liputan 6*. <https://www.liputan6.com/news/read/4567444/jokowi-akui-ada-tumpang-tindih-data-dana-bansos-yang-rugikan-masyarakat>
- Program Keluarga Harapan. (2018). Apa Itu Program Keluarga Harapan. Retrieved from <https://pkh.kemensos.go.id/?pg=tentang-pkh-1>
- Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. R. A., & Ikhsan, S. (2020). PEMETAAN PERMASALAHAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA. *JURNAL PKN (Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara)*, 2(1), 90–102. Retrieved from <http://www.jurnal.stan.ac.id/index.php/pkn/article/view/995>
- Sindonews. (2021, Mei 25). DTKS Lawas Dinilai Jadi Penyebab Tumpang Tindih Penyaluran Bansos. *Sindonews.com*. <https://nasional.sindonews.com/read/436856/15/dtk-lawas-dinilai-jadi->

penyebab-tumpang-tindih-penyaluran-bansos-1621919130/
 Tempo. (2021, Maret 02). Bappenas Akui Data Penerima Bantuan Pemerintah Kerap Tumpang Tindih. *Tempo*.
<https://bisnis.tempo.co/read/1437932/bappenas-akui-data-penerima-bantuan-pemerintah-kerap-tumpang-tindih>
 Tempo. (2021, Juli 31). Mahfud Ungkap Sejumlah Permasalahan yang Dihadapi dalam Penyaluran Bansos. *Tempo*.
<https://nasional.tempo.co/read/1530474/densus-88-kenakan-pasal-pendanaan-terorisme-kepada-farid-okbah-dkk>
 Warta Ekonomi. (2020, November 25). Apa itu BLT? *Wartaekonomi.co.id*.
<https://wartaekonomi.co.id/read315489/apa-itu-blt?page=all>